



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

Bandung, Selasa, 21 Mei 2024 – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 diserahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh **Anggota V BPK, DR. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.** dengan didampingi **Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), DR. Slamet Kurniawan M.Sc., Ak., CSFA, CPA, CFA, ERMCP., dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFA.** Kepada **Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn.) Taufik Hidayat, SH., MH** dan **Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey T. Machmudin, S.E., M.T.**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal.** Adapun penekanan suatu hal menekankan pada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, IHPD Tahun 2023 yang turut diserahkan dalam Sidang Paripurna memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2023. IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara bagi DPRD, IHPD dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut :

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Hotline 089662286939 / Email : humas.jabar@bpk.go.id